

POLA KEMITRAAN BUMN DAN USAHA KECIL Kasus Industri Cor Logam di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah¹

Ratih Purbasari, Ike Nilawati, Edi Kusumawati²

INTISARI

Pengembangan industri pedesaan bertujuan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi di pedesaan, serta menekan migrasi ke daerah lain sehingga masalah ketenagakerjaan di perkotaan ikut teratasi (Mubyarto, 1986). Sebagian besar usaha kecil industri cor logam di Ceper merupakan kegiatan sampingan keluarga. Sementara itu, model kemitraan dalam industri logam di Ceper adalah pola subkontrak, akibatnya pengusaha industri cor logam lebih menghargai bantuan dalam bentuk 'order' atau pesanan produk daripada bantuan berupa uang. Permasalahannya, mengapa pola kemitraan berupa subkontrak dianggap ideal sehingga dapat mereproduksi kesenjangan? Dengan masalah tersebut penelitian bertujuan mengidentifikasi permasalahan pola kemitraan bapak-anak angkat dalam rangka pengembangan usaha kecil, terutama pola kemitraan yang berbentuk subkontrak. Dengan demikian penelitian ini akan menjawab permasalahan dualisme dan kesenjangan pada industri cor logam di Ceper sebagai akibat adanya subkontrak sebagai salah satu kebijakan pemerintah. Pola kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil akan dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif usaha kecil dari sisi tingkat perkembangannya. Kedua, perspektif pengusaha kecil, yakni pengusaha cor logam dalam hal mitra usaha dan pola kemitraan. Penelitian akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh lewat metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam (*indepth interview*) memakai *interview guide* data kualitatif. Data sekunder atau data kuantitatif diperoleh melalui studi literatur berupa hasil-hasil penelitian terdahulu dan data monografi setempat. Terbukti bahwa pola subkontrak memberikan keuntungan bagi pengusaha industri cor logam di Ceper, karena mereka mendapatkan kemudahan pemasaran, alih teknologi, alih ketrampilan dan pengetahuan, bahan baku dan modal, serta status usaha dan fleksibilitas. Pola kemitraan subkontrak yang dikembangkan di Ceper secara umum bisa memacu pertumbuhan ekonomi, namun masalah penguasaan akses pincang tidak sampai ke lapisan terbawah pengusaha kecil di Ceper. Oleh karena itu, pola keterkaitan subkontrak hingga samapai pada pemberdayaan pengusaha kecil. Salah satu cara pemecahannya adalah mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan tentang subkontrak, selain itu juga memberi perlindungan usaha dengan perumusan Undang-Undang tentang persaingan usaha yang fair.

¹ Juara III Lomba Karya Widya Utama Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 1996/1997, Pembimbing: Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si.

² Mahasiswa Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pengembangan industri pedesaan adalah untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi di daerah pedesaan. Peningkatan industri pedesaan tersebut, selain untuk menciptakan kesempatan kerja baru juga untuk memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menampung pengangguran yang ada. Dengan demikian, *under employment* dan pengangguran musiman di desa dapat ditekan, dampaknya pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan penduduk.

Peningkatan industri pedesaan cor logam di Ceper dipandang cukup berhasil. Perkembangan tadi dapat diikuti sebagai berikut: Tahun 1991 tercatat ada 252 industri rumah tangga berskala kecil dengan daya tampung sejumlah 6.266 tenaga kerja; tahun 1994 tercatat 320 industri cor logam; tahun 1995 terdapat 389 industri cor logam di Ceper,

termasuk di dalamnya berskala besar, sedang, dan kecil (PMB-LIPI, 1996)

Perkembangan usaha industri cor logam di Ceper tadi mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, bahkan pesatnya pertumbuhan usaha itu mendorong masuknya pekerja dari luar daerah (Kutanegara, 1994).

Penyerapan tenaga kerja yang meningkat di kawasan Ceper ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Tampak di daerah itu ada dualisme berupa kecenderungan menguatnya pengusaha sukses dan sulitnya perkembangan para pengusaha kecil yang sangat tergantung pada pemberian 'order' dari pihak pemberi 'order'.

Berdasarkan visi usaha, pengusaha kecil dapat digolongkan dalam dua kelompok (Abdullah *et al.*, 1996). Pertama, pengusaha yang memandang bidang usahanya sebagai sumber pendapatan keluarga

sehingga pengelolaannya lebih profesional. Bagi kelompok ini pengembangan usaha merupakan kebutuhan, maka segala peluang maju diterobos. Kelompok kedua adalah pengusaha kecil yang memandang usahanya sebagai usaha sampingan. Kelompok ini memandang bidang usahanya bukan sebagai sumber pendapatan utama keluarga, sehingga pengelolaan usahanya kurang profesional, dalam arti "asal jalan saja" (Kedaulatan Rakyat, 12 Juli 1996).

Sebagian besar usaha kecil industri cor logam di Ceper berasal dari kegiatan sampingan, dan selanjutnya ada yang berkembang sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Sementara itu pemerintah pun telah memperhatikan pengembangan usaha kecil agar kesejahteraan pelaku dan perkembangan ekonomi secara umum dapat seimbang. Hal demikian didasari atas pandangan bahwa usaha kecil merupakan bagian dari struktur ekonomi secara umum (Saleh, 1986).

Usaha pengembangan industri kecil disebut pula industrialisasi pedesaan. Industrialisasi pedesaan ini menjadi isu penting yang memerlukan perhatian pada segi keterkaitan (Wie, 1988). Bentuk-bentuk keterkaitan dalam konteks industrialisasi seperti industri cor logam di Ceper Klaten antara lain:

1. Keterkaitan antarsektor (*intersectoral linkages*), yaitu interaksi antara sektor pertanian, industri dan jasa;
2. Keterkaitan di dalam sektor industri sendiri, yaitu antara industri kecil, sedang, dan besar.

Kedua bentuk keterkaitan tersebut memungkinkan terjadinya alih teknologi, perluasan pasar, dan modal kepada usaha skala kecil, baik industri maupun usaha kecil lainnya. Dengan keterkaitan itu diharapkan ada peningkatan peran usaha kecil bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil antara lain:

Pada Pelita III, pembinaan dalam rangka pengembangan aspek lokasi usaha dalam bentuk sentra industri. Periode ini diperkenalkan konsep hubungan keterkaitan sistem bapak-angkat, yaitu industri besar menyediakan bahan baku (terutama BUMN di lingkungan Departemen Perindustrian). Salah satu strateginya adalah BUMN yang berhasil harus membina pengusaha industri kecil, dan hal ini telah dilakukan pada industri cor logam di Ceper Klaten.

Pelita IV, pengembangan industri diarahkan pada pendalaman dan pemantapan struktur industri yang dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya. Program kerjasama dan sistem bapak-angkat mulai dilaksanakan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada 5 sub kegiatan, yaitu: penciptaan iklim usaha, peningkatan kerjasama, peningkatan bantuan, peningkatan sarana pelayanan lapangan, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri kecil dan perangkat pelaksana.

Pelita V, memusatkan perhatian pada pasar global. Pengembangan usaha diarahkan pada kemampuan produksi untuk tujuan ekspor, pengembangan program keterkaitan, dan penyempurnaan iklim usaha serta investasi.

Pelita VI, ada kebijakan dasar dan kebijakan operasional untuk mengatasi kendala-kendala yang dirasakan pada periode sebelumnya. Kebijakan dasar terdiri atas: 1) meningkatkan prakarsa, kemampuan, dan peran serta masyarakat pengusaha kecil melalui peningkatan mutu sumber daya manusia; 2) meningkatkan kemampuan dan peran pengusaha kecil diberbagai sektor usaha. Kebijakan

operasional meliputi: 1) meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar; 2) meningkatkan akses terhadap modal dan memperkuat struktur modal; 3) meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen; 4) meningkatkan akses dan penguasaan teknologi; dan 5) meningkatkan kemitraan yang mantap.

Komitmen pemerintah dalam upaya pengembangan industri kecil pada dasarnya merupakan langkah konkrit untuk menjawab berbagai kesenjangan struktural serta hambatan-hambatan inherent yang bersumber dari perilaku dan sifat dasar industri kecil itu sendiri, yaitu berupa rawan dari segi daya tumbuh atau pun motivasi pengusaha untuk berkembang (Abdullah *et al.*, 1996).

Pola kemitraan antara pengusaha industri kecil dan besar di Indonesia ada dua: 1) pola dagang, peran pengusaha besar sebagai bapak-angkat bertindak sebagai pemasar produk hasil mitra usahanya; 2) pola *vendor*, yaitu produk anak-angkat tidak ada kaitan dengan produk yang dihasilkan Bapak-angkat; 3) pola subkontrak, yaitu produk yang dihasilkan oleh anak-angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha bapak-angkat. Sedangkan pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni, artinya tidak ada hubungan bisnis langsung antara bapak-angkat dengan mitra usahanya (Mudrajad Kuncoro, Kedaulatan Rakyat 12 Juli 1996).

Model kemitraan yang dilaksanakan di industri logam Ceper adalah pola subkontrak. Pola subkontrak dapat berkembang di Ceper karena bentuk bantuan berupa uang dianggap tidak cukup efektif untuk mengembangkan industri cor logam. Para pengusaha industri cor logam memandang bantuan berupa order lebih berarti dibandingkan dengan bantuan keuangan.

Setiap program pemerintah selalu diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataan tidak semua program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan rencana. Kegagalan dapat bersumber dari tiga hal: ketidaktepatan rumusan program (*program design*), proses implementasi yang tidak berjalan dengan baik, dan kurangnya partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran program. Tidak jarang program yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, tetapi justru menjadi beban yang tidak ringan bagi penerima program bantuan (Abdullah *et al.*, 1996).

Sehubungan dengan pola kemitraan model subkontrak yang dapat berjalan di Ceper, timbul sebuah pertanyaan, kenapa kemitraan subkontrak yang dianggap ideal itu bisa mereproduksi kesenjangan?

Untuk itulah, penelitian nanti akan berupaya menjawab permasalahan itu, yakni dualisme dan kesenjangan di industri cor logam Ceper.

METODE PENELITIAN

Guna memperoleh hasil penelitian yang memadai, data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian dengan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang menggunakan *interview guide* data kualitatif. Data sekunder atau data kuantitatif diperoleh melalui studi literature terhadap hasil penelitian sebelumnya dan data monografi setempat, serta data laporan periodik perkembangan industri cor logam Ceper dari tahun ke tahun.

Tahap pertama penelitian dilakukan dengan observasi, terdiri atas observasi awal dilanjutkan dengan wawancara di lapangan. Wawancara dan observasi dilakukan sembari melihat langsung proses produksi pengecoran logam, penanganan administrasi, dan mengamati profil usaha itu sendiri.

PROFIL INDUSTRI COR LOGAM DI CEPER

1. Definisi Usaha Kecil

Sektor usaha kecil mencakup jenis usaha yang berskala kecil antara lain perdagangan lingkup lokal, perdagangan kecil-kecilan, kerajinan rumah tangga, industri rumah tangga, dan usaha sam-pingan. Sasaran kegiatan ini adalah memproduksi barang yang dapat diperdagangkan pada daerah tertentu dan dalam jumlah terbatas. Kegiatan usahanya biasanya dilakukan dalam satuan usaha keluarga dengan tenaga kerja terbatas, dan menggunakan teknologi sederhana. Produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat, dan sebagian lagi dipasarkan ke daerah lain (Suryo, 1994). Ciri lain adalah mempunyai produksi khusus, volume produksi rendah dan metode produksi sederhana, serta tidak membutuhkan modal banyak sehingga dapat dikelola dengan manajemen sederhana (Rahardjo, 1979).

Batasan baku sebagai ukuran usaha kecil di Indonesia tidak ada, karena masing-masing instansi membuat batasan sendiri-sendiri. Biro Pusat Statistik menggunakan batasan usaha kecil berdasar jumlah tenaga kerja 5-19 orang untuk membedakan dengan industri rumah tangga yang jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang dalam satu unit produksi. Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia menggunakan kriteria pemilihan aset hingga Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. Departemen Perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan permodalan yang dimiliki tidak lebih dari Rp 25 juta. Sedangkan Departemen Koperasi dan PPK mendasarkan diri pada batasan penjualan antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta. Dalam Keppres no. 16/1994 dinyatakan bahwa usaha kecil adalah usaha produktif dengan aset maksimal Rp 400 juta (Abdullah *et al.*, 1996).

2. Latar Belakang Usaha/Pengusaha Kecil

Latar belakang usaha dalam industri kecil dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni:

- (1) Usaha kecil yang bersifat turun temurun. Usaha kelompok ini dikembangkan berdasarkan atas usaha rintisan nenek moyang pelaku, sehingga pengelolaannya tinggal melanjutkan model pendahulunya. Para pengelola usaha kecil kelompok ini pada umumnya tidak mengenyam pendidikan tinggi.
- (2) Usaha kecil bukan usaha warisan dari orang tua. Usaha ini murni dirintis dan dikembangkan oleh pengelolanya berdasar bakat (*entrepreneurship*) atau keterampilan yang dimiliki dan diperoleh dari pendidikan formal menengah (SMU atau Perguruan tinggi). Usaha mereka bisa berkembang karena ada proses 'belajar' dari pendiri-pendiri bidang usaha tertentu, sehingga ketika telah mampu dia mendirikan usaha sendiri.
- (3) Usaha kecil yang dikembangkan karena pengaruh lingkungan.

Usaha ini dikembangkan oleh pengelolanya karena melihat keberhasilan masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggalnya dalam mengelola suatu bidang tertentu.

Pendirinya kadang tidak mengetahui sama sekali dalam metode pengelolaannya.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar untuk mengembangkan usaha bagi pengusaha biasanya hanya diperoleh dari pengalaman (Abdullah *et al.*, 1996).

Dua faktor penyebab penting dalam keputusan terhadap pendirian perusahaan menurut Weber (1993) adalah sistem warisan dan kebiasaan tiruan (imitasi). Masalah warisan didasarkan pada prinsip tanggung jawab orang tua bagi anak-anaknya untuk menjamin masa depan. Faktor penyebab kedua adalah keinginan berwiraswasta. Cara produksi yang tradisional tidak menuntut kualifikasi yang tinggi, maka sebagian dari buruh cor logam yang mendapat keterampilan lewat pengalaman kerja (*job training*) cenderung meninggalkan status buruh untuk berwiraswasta.

3. Pengelolaan Usaha Kecil

Pengembangan usaha kecil memiliki arti yang sangat penting. Bank Dunia (1993) melaporkan bahwa struktur ekonomi Indonesia mengalami ketimpangan besar, yakni 35 % GNP dikuasai oleh 200 konglomerat yang mengontrol 4.000 perusahaan dengan omset Rp 93 trilyun. Sementara usaha skala kecil, menurut data BPS 1992 berjumlah 33,45 juta, sebagian besar beromset di bawah Rp 50 juta. Dalam ketidakseimbangan struktur perekonomian Indonesia sekarang ini usaha kecil mampu muncul sebagai stabilisator yang cukup efektif. Meskipun sumbangan usaha kecil terhadap Pendapatan domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 10 %, namun dapat sebagai indikasi pemenuhan Trilogi Pembangunan (pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas). Sebaliknya, stagnasi usaha kecil berarti tttimpangnya alokasi sumber daya dan pendapatan, artinya peran usaha kecil strategis dalam mengatasi isu kesenjangan.

Stagnasi yang sering terjadi pada usaha kecil berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga prinsip-prinsip manajerial modern (seperti pembukuan) terabaikan. Selain itu, para pengusaha kecil tidak mengetahui sistem hukum sehingga usahanya tidak berbadan hukum. Akibatnya prosedur kegiatan usaha, seperti transaksi jual beli, pemesanan, dan sebagainya tidak dikuatkan secara hukum tetapi atas dasar kepercayaan.

4. Perkembangan Industri Cor Logam di Cepher

Perkembangan industri di Kabupaten Klaten dianggap sebagai salah satu contoh keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri. Secara historis, pertumbuhan industri yang menjadi maju itu diawali dengan pertumbuhan sektor pertanian yang baik.

Salah satu industri yang mengalami perkembangan pesat di wilayah Cepher adalah pandai besi. Industri ini mampu berkembang karena semula berhubungan dengan kebutuhan sektor pertanian dan rumah tangga, sehingga berkembang dan berubah untuk mencukupi kebutuhan sektor industri.

Kondisi masyarakat yang secara kultural telah siap menerima sektor industri sebagai sisi lain kehidupan masyarakat pedesaan, merupakan modal utama dalam pengembangan industri di wilayah tersebut. Pada mulanya industri cor logam berpusat di Dukuh Batur, akhirnya merembet ke beberapa wilayah dalam lingkungan desa yang sama hingga ke desa-desa lain di Kecamatan Cepher (desa Tegarejo, Kurung, Ngawonggo, dan Klepu). Secara pasti

tidak ditemukan bukti, kapan mulai ada industri cor logam di Ceper, namun ada yang memperkirakan dimulai pada akhir abad ke-17. Masa itu kerajaan Mataram berdiri, dan para empu atau pandai besi harus memenuhi kebutuhan senjata (keris) untuk kepentingan kerajaan (Tjokrowinoto, 1987).

Dengan awal perkembangan seperti itu, maka Dukuh Batur dikenal sebagai lokasi pandai besi di Klaten. Pada saat sektor pertanian berkembang, maka permintaan alat-alat pertanian mengarah ke sana. Pada akhirnya permintaan alat-alat perang kerajaan Mataram pun juga semakin meningkat (Kutanegara, 1994).

Perang Dunia I merupakan momentum penting bagi industri tersebut. Pada waktu itu pabrik-pabrik gula mengalami kesulitan suku cadang dari Eropa, maka mereka mengalihkan perhatiannya ke industri tradisional ini. Tahun 1918 salah seorang pengusaha bernama Haji Royani menjawab tantangan tersebut dengan memproduksi kapak dari lori-lori dan suku cadang pabrik gula. Jalan yang dirintisnya itu merangsang sesamanya untuk menganekaragamkan dan memodernisasikan produk-produk mereka (Tjokrowinoto, 1987). Keadaan ini dianggap sebagai tonggak perubahan orientasi masyarakat yang semula hanya memproduksi alat-alat pertanian kemudian beralih ke sektor industri lebih besar.

Pada jaman Jepang di Indonesia, kebutuhan persenjataan memaksa mereka untuk memproduksi senjata di wilayah pendudukan. Upaya itu dilakukan dengan mendorong para pandai besi di Batur untuk memproduksi beberapa jenis peluru dan granat. Demikian pula pada jaman perang kemerdekaan melawan Belanda, keterbatasan senjata para pejuang telah memaksa mereka untuk memproduksi senjata sendiri.

Akar-akar industri cor logam di Ceper tampak sangat panjang, namun salah satu tonggak perkembangan maju terjadi masa akhir pendudukan Belanda, yaitu dengan produksi bahan-bahan kebutuhan pabrik gula dan tenun.

Saat ini wilayah Kecamatan Ceper memiliki sentra industri cor logam terbesar dan terkenal di Indonesia. Hasil produksinya dipasarkan hingga Australia, Taiwan, Belgia, Hongkong, dan Nederland. Selain itu juga memenuhi pasaran dalam negeri, terutama Jawa.

Jenis produk yang dibuat di Ceper cukup bervariasi, misalnya: Komponen tenun dan tekstil (termasuk roda-roda giginya), kaki mesin jahit, komponen *rice polisher*, rem tromol, pipa air, *fittings*, pagar, komponen rem kereta api, timbangan, pompa air, kompor gas, pres tegel, dan sebagainya. Namun demikian, cara produksinya masih sederhana, hanya pada bagian *finishing* (bor, penghalusan, bubut, dll.) telah digunakan beberapa mesin khusus.

5. Pertumbuhan Ekonomi dalam Industri Cor Logam

Sebagai industri berskala nasional, maka keterkaitan industri ini dengan pertumbuhan ekonomi nasional sangat erat. Permintaan kebutuhan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti: wajan, kerekas timba, mesin jahit, pompa air, setrika, dsb. memberi angin segar terhadap industri cor logam Ceper (Kutanegara, 1994).

Penurunan permintaan akan komponen alat-alat produksi pernah dialami para pengusaha cor logam Ceper. Untuk mengatasinya, perubahan manajemen pernah dilakukan meski tidak berhasil, akhirnya para pengusaha kecil menggunakan pola bapak angkat sebagai alternatif

pemecahan masalah. Model seperti itu terjadi pada saat munculnya gejala penumpukan order di dalam usaha beberapa industri besar dan kuat. Pada saat itulah, karena keterbatasan alat-alat produksi, untuk memenuhi pemesanan terjadilah sistem subkontrak dengan perusahaan lain. Sistem subkontrak ini mulai dikembangkan di Ceper sekitar tahun 1970-an.

6. Klasifikasi Industri Cor Logam

Banyak kriteria yang dipakai untuk mengklasifikasikan industri cor logam di Ceper. Beberapa kriteria antara lain segi teknologi, jumlah tenaga kerja, dan modal atau asset perusahaan.

Kebijakan ekonomi dan peran serta pemerintah yang cukup besar telah memunculkan variasi yang sangat besar pada industri cor logam di daerah ini. Terdapat empat macam industri cor logam dilihat dari skala usahanya, yaitu: perusahaan keluarga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar.

Industri cor logam juga dapat dibedakan menjadi tiga hal dilihat dari sisi manajemennya. Ketiga kategori itu adalah: pertama, perusahaan keluarga, adalah perusahaan yang tidak menggunakan tenaga administratif, tidak memiliki nama atau kalaupun ada tidak dicantumkan (seperti PT atau CV). Kedua, apabila perusahaan telah menggunakan dua atau tiga tenaga administratif disertai nama perusahaan menjadi CV, maka perusahaan termasuk perusahaan semi modern. Ketiga, ketika perusahaan berkembang dan menggunakan tenaga administratif lebih dari tiga orang, ada manajer dan nama perusahaan berubah menjadi PT, maka perusahaan tersebut termasuk dalam klasifikasi perusahaan modern (Kutanegara, 1994).

Tabel 1. Klasifikasi industri cor logam

Skala Industri	Teknologi	Jumlah Pekerja
Industri rumah tangga	Alat sederhana Tanpa alat cor	Keluarga 1-4 orang
Industri kecil	Alat sederhana Alat cor (tungki)	Luar keluarga 5-19 orang
Industri menengah	Alat modern Tungki Mesin finishing (< 7 unit)	Luar keluarga 20-99 orang
Industri besar	Alat modern Tungki/kupola Mesin finishing (> 8 unit)	Luar keluarga > 100 orang

Tabel 2. Klasifikasi perusahaan cor logam

Manajemen Perusahaan	Penggunaan Tenaga Kerja	Bentuk Perusahaan
Perusahaan keluarga	Tanpa tenaga administrasi	Tidak jelas
Perusahaan semi modern	Tenaga administrasi (2-3 orang)	CV
Perusahaan modern	Tenaga administrasi (> 3 orang) Manajer (1-4 orang)	CV atau PT

Sebagian besar industri cor logam di Ceper masih menerapkan manajemen tradisional, bahkan industri-industri

kecil sama sekali kurang memahami pentingnya pendidikan kejuruan dan bidang pekerjaan. Apabila kalangan pengusaha kecil ini membutuhkan tenaga kerja, pertama-tama mereka mengarahkan perhatian pada calon-calon yang berasal dari lingkungan keluarga yang sangat luas (Lampelius & Thoma, 1979). Hal demikian mengakibatkan mereka tidak mengetahui adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam perusahaan serta penawaran tenaga kerja terdidik, sehingga mereka tetap berada dalam struktur tradisional. Meskipun demikian, terdapat juga pengusaha yang sukses seperti: Musa Asy'arie (CV Baja Kurnia), Jamaludin (CV Abadi Indah), Istanto (CV Bonjor Jaya), Anas Yusuf (CV Nentiyasa Perwira), Edi Purwanto (CV KARYa Rini), Robert HARYanto (PT Rumini), dan Hadi Muhyanto (PT Sumber Logam).

7. Teknologi dan Proses Produksi Industri Cor Logam

Teknologi merupakan hasil dari proses historis, mencakup suatu tingkat tertentu yang melibatkan penggantian atau perubahan seperangkat ciri dari tahap pembangunan teknologi lain (Tjokrowinoto, 1987). Industri cor logam di Ceper tidak hanya dapat diukur dari segi asset dan manajemen perusahaan, melainkan juga dari segi teknologi.

Apabila dicermati, dalam waktu singkat industri cor logam di daerah ini telah mengalami lompatan teknologi cukup pesat. Dari usaha pandai besi dengan peralatan tradisional menjadi usaha pengecoran logam meski dengan alat sederhana. Dari pemakaian alat cor sederhana, meningkat menjadi pemakaian alat modern. Akhirnya sejak tahun 1972 terdapat 400 unit telah menggunakan alat tambahan berupa alat proses penyelesaian tahap akhir (*finishing process*).

Lompatan teknologi bermula dari pemakaian alat cor bernama besalen, alat berwujud tolong batu bata berbetuk pipa, bagian dasar diberi kowen berbentuk cangkir dari tanah liat dari daerah Bayat (Klaten). Dari besalen berubah menjadi kupola, yaitu alat cor logam modern berukuran 8 meter berdiameter 1-3 meter yang berkapasitas produksi sampai 15 ton per hari; akhirnya meningkat ke pemakaian alat tungkik, atau sebaliknya dari tungkik ke kupola. Tungkik adalah dapur peleburan, tinggi 4 meter, diameter 90 sentimeter, penuangan dilakukan dengan memiringkan tubuh dapur (ditungkik).

Perubahan teknologi ini sebagai titik awal peningkatan pertumbuhan industri di daerah ini. Perubahan tingkat produksi diikuti pula dengan peningkatan kualitas produksi. Namun demikian, perubahan teknologi dengan alat produksi tadi ternyata tidak diikuti dengan perubahan perilaku pengecoran, sehingga tidak mengubah proses produksi cor logam.

Secara umum terdapat sekitar 15 tahap proses cor logam, yaitu:

- a. menyiapkan alat cetak;
- b. memasukkan arang ke dalam tungku;
- c. memasukkan bahan bakar ke dalam mesin diesel;
- d. membakar dan meniup arang dalam tungku;
- e. memasukkan batu arang ke dalam tungku;
- f. memasukkan besi dan bahan lain ke dalam tungku;
- g. menuangkan besi cair ke dalam ember baja; 8) membawa ember ke bagian cetakan;
- h. mencetak besi cair;
- i. mendinginkan besi cair;

- j. memecahkan cetakan dan mengeluarkan hasilnya;
- k. membawa produk ke ruang penyelesaian;
- l. menyelesaikan produk (*finishing process*);
- m. melakukan pengecatan;
- n. menyimpan di gudang.

Dari tahapan di atas tidak tampak lompatan proses, sehingga lompatan teknologi hanya terjadi dengan penggantian alat produksi dari besalen ke tungkik atau kupola. Dengan kupola, suhu yang dihasilkan mencapai 1500-2500 derajat celsius, sementara dua lat yang lain hanya 1000-1500 derajat celsius.

Dalam perkembangannya, ternyata banyak pengusaha mengganti kupola menjadi tungkik, dengan alasan bahwa kuantitas produksi (15 ton per hari) tidak seimbang dengan kemampuan produksi (5-10 ton per hari).

Selain daripada itu, pertumbuhan perusahaan juga menuntut peningkatan kualitas pekerja. Untuk kepentingan itu maka beberapa pengusaha menempuh jalan antara lain:

- 1) Mengikutsertakan pekerjaannya ke dalam kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan kelompok-kelompok lain di bawah koordinasi Koperasi Batur Jaya, koperasi pengusaha industri cor logam di Ceper;
- 2) Mengikutsertakan pekerja dalam kursus-kursus singkat yang diadakan oleh beberapa industri, terutama dalam hal kualitas peningkatan industri.

PROGRAM PEMBINAAN USAHA KECIL

1. Kebijakan Pembinaan Usaha Kecil

Kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kecil merupakan bagian dari kebijaksanaan pemantapan dan pendalaman struktur industri agar mampu memperkuat atau menjadi landasan sektor industri dalam struktur perekonomian nasional.

Kebijakan pemerintah sejak jaman Orde Baru adalah mengupayakan peningkatan jenis usaha kecil menjadi jenis usaha kelas menengah. Hal ini berhubungan dengan Trilogi Pembangunan yang menekankan "pemerataan" sebagai prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Dalam PJPT II, disebutkan GBHN 1993, bahwa pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah adalah ketentuan pengusaha besar swasta atau BUMN harus membantu terciptanya kesempatan bagi pengusaha ekonomi lemah dalam bentuk keterkaitan ataupun bentuk pola pembinaan, sehingga pengusaha ekonomi lemah berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Salah satu strateginya adalah menugaskan manajemen BUMN melakukan pembinaan bagi pengusaha industri kecil.

Berdasarkan SK Menkeu RI No. 1232/KMK.013/1989 yang diperbarui dengan SK Menkeu RI No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana Bagian Laba BUMN, maka BUMN ditunjuk pemerintah sebagai lembaga pembina usaha kecil dan koperasi. Pelaksana lebih lanjut diatur oleh SK bersama Dirjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Dirjen Pembinaan Usaha Kecil Depkop dan PPK No. Kep-1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPK/X/1994.

Bentuk pembinaan yang dikembangkan meliputi 5 hal pokok, yaitu:

- 1) Peningkatan SDM lewat pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan penelitian untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen, serta keterampilan teknis produksi;
- 2) Pinjaman modal kerja dan investasi untuk peningkatan modal usaha, pengadaan sarana kerja, dan modernisasi peralatan;
- 3) Bantuan pemasaran dan promosi;
- 4) Bantuan jaminan dalam rangka mendapatkan kredit perbankan dan transaksi dengan pihak ketiga;
- 5) Penyertaan pada perusahaan modal ventura.

Diharapkan dengan bantuan ini usaha kecil dan koperasi dapat berkembang menjadi tangguh dan mandiri.

2. Implementasi Program Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN

Pembinaan industri kecil lewat program keterkaitan usaha ada tiga kemungkinan. Pertama, BUMN bertindak langsung sebagai pembina. Kedua, membentuk anak perusahaan khusus untuk menangani industri binaan. Ketiga, kerjasama dengan lembaga lain. BUMN dapat memilih salah satu dari tiga alternatif tadi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan usaha kecil oleh BUMN masih mengalami hambatan. Banyak usaha besar (termasuk BUMN) belum merasakan peran usaha kecil sebagai bagian dari langkah manajemen strateginya. Mereka membantu dan membina kemitraan semata-mata karena anjuran pejabat dan "ketakutan" akan isu kesenjangan sosial. Bagi BUMN pun membantu karena sekedar memenuhi tuntutan MENKEU. Dengan keterpaksaan tersebut maka pola kemitraan tidak bisa langgeng (Kedaulatan Rakyat, 12 Juli 1996).

Model kemitraan yang selama ini berkembang, sebagian besar masih berpihak kepada pengusaha besar saja. Pola kemitraan hanya menyentuh kelompok atas dan akibatnya menghambat perkembangan usaha kecil di pedesaan. Alokasi bantuan cenderung mengarah kepada industri yang sudah berkembang (*established*) dan memiliki asset mendekati batas kriteria penerima bantuan (Rp 600 juta). Industri kecil yang perlu dibantu justru tidak mendapatkan bantuan.

Adanya penyimpangan dari rumusan ideal kemitraan, seperti kemitraan sebagai cara untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), bukan keuntungan, hal ini menyebabkan alokasi dana ke arah perusahaan yang telah berkembang. Alasan dasarnya adalah pada strategi untuk menjamin pengembalian dana, sehingga muncul kapitalis-kapitalis baru yang akhirnya mensubordinasi usaha sejenis yang lebih kecil. Dalam hal ini program pembinaan usaha kecil tanpa disadari telah mereproduksi kesenjangan.

3. Pola Kemitraan dalam Industri Cor Logam

Pemerintah Indonesia menganjurkan sistem "Bapak-Anak Angkat" di sektor industri. Menurut sistem ini, Perusahaan Negara dan/atau Perusahaan Swasta besar membantu langsung usaha industri kecil dengan memberikan subkontrak kepada usaha kecil (Saleh, 1986). Praktek yang ada meliputi pola dagang, pola vendor, pola subkontrak, dan pola pembinaan. Dari beberapa pola yang ada ini, pola subkontrak banyak ditemui di industri cor logam Cepher, Klaten. Pola subkontrak ini berkembang pada tahun 1970-an.

Ada empat faktor yang mendorong berkembangnya praktek subkontrak, yaitu: (1) *Full Capacity Subcontracting*, yaitu praktek subkontrak yang timbul karena kontraktor menghadapi kegiatan yang melebihi kapasitas produksinya (*peak load*); (2) *Specialized Subcontracting*, yaitu praktek subkontrak yang timbul karena para kontraktor mengetahui adanya sejumlah subkontraktor yang ternyata memiliki mesin/alat khusus dan atau keahlian khusus untuk membuat komponen tertentu; (3) *Marginal Subcontracting*, yaitu kontraktor memberi order kepada subkontraktor karena barang yang dipesan terlalu sedikit jumlahnya atau jarang dipesan secara reguler; (4) *Cost Saving Subcontracting*, yaitu kontraktor memberi order karena adanya biaya yang lebih rendah di pihak subkontraktor (Saleh, 1986).

Motivasi pihak prinsipal (pemesan) dan subkontraktor dalam hubungan subkontrak sangat menarik untuk diperhatikan. Motif ekonomi menjadi landasan utama hubungan subkontrak, sementara motif sosial hanya sebagai kemasam ungkapan "mencoba membantu mengangkat usaha kecil" untuk membungkus motif sebenarnya. Bagi pihak prinsipal, memasuki hubungan subkontrak berarti bisa mengurangi kebutuhan investasi lahan, peralatan, fluktuasi permintaan, dan ongkos produksi. Lewat sistem ini prinsipal diuntungkan karena dapat merekrut buruh berupah rendah, menghindari resiko konflik perburuhan, serta bebas dari kewajiban memberi jaminan sosial bagi buruh. Selain itu, segala resiko dan biaya kontrol produksi dialihkan ke tangan subkontraktor. Bagi subkontraktor, sistem ini bisa menjawab kesulitan pasar, alih teknologi dan pengetahuan, bahan baku, dan modal.

Beberapa perusahaan yang telah masuk ke sistem subkontrak berkembang secara mencolok. Kelompok perusahaan ini memiliki areal cukup luas dan bangunan yang relatif baru. Tingkat teknologi yang dipakai juga semakin modern, bahkan ada yang menggunakan mesin-mesin impor.

Cara sederhana untuk membedakan perusahaan modern dengan perusahaan tradisional adalah dengan melihat luas bangunan pabrik, teknologi, dan jumlah pekerja. Beberapa perusahaan ini berdiri sebagai perusahaan berbadan hukum, seperti PT atau CV. Jenis-jenis produksinya lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat luar dan instansi pemerintah atau swasta. Hasil produksi mereka antara lain berupa: pipa air minum (minimal berdiameter 5 inci), komponen rem kereta api, barbel, komponen mesin diesel merek tertentu, pipa dan ompa air dengan merek tertentu, dan ram jalan raya atau got. Sebaliknya, perusahaan kecil hanya memproduksi barang-barang cor berskala kecil dan periodik, tergantung pada pesanan perantara.

Dalam perkembangan sektor industri di Indonesia dapat diamati bahwa kebijaksanaan pemerinatah belum banyak menyentuh persoalan yang dihadapi oleh industri pedesaan. Sebagai contoh, perusahaan menengah dan besar di Cepher masih memproduksi barang-barang yang menjadi produksi utama perusahaan kecil dan rumah tangga, akibatnya produk perusahaan besar itu menguasai pasar, dan perusahaan kecil tidak mampu memperbesar produksi dan tidak bisa memperluas pemasarannya.

Hubungan kemitraan dengan pola subkontrak ternyata juga menimbulkan ketimpangan dari sisi penentuan laba, sebab industri besar menjadi penentu harga beli hasil produksi industri kecil, dan pihak industri kecil hanya bisa menerima ketentuan harga dari industri besar. Oleh karena itu, sebenarnya pola

... bagi industri
... klien, dan
... yang bisa
... kecil.
... Ceper
... ASTRA,

Logam,

... terjadi
... erapa
... amun
... bila
... nan
... ang

... f
... f
... f

sangat dilematis karena kebijakan pemerintah hanya mampu ditangkap oleh sekelompok kecil pengusaha.

Pada dasarnya kemitraan hendaknya berprinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu. Dengan prinsip itu, sebaiknya pengusaha besar bermitra usaha dengan pengusaha kecil dalam prinsip *Partner in Progress*. Selain prinsip itu, prinsip lain adalah menjaga hubungan yang meniadakan superioritas dan inferioritas, sehingga yang ada hanya *Mutual Relationship*, saling membantu karena ada hubungan proses produksi yang saling menguntungkan.

Harus diakui, penerapan kedua prinsip di atas tidak mudah dalam praktek bisnis. Dalam praktek, perusahaan besar, BUMN, dan Bank menerapkan prinsip kepada usaha kecil dengan tiga prinsip, yaitu: 1) menguntungkan, 2) aman dan, 3) bermanfaat. Gerakan kemitraan di Indonesia seyogyanya membalik urutan tiga prinsip tadi menjadi: 1) bermanfaat, artinya kemitraan apa pun bentuknya hendaknya membawa manfaat bagi usaha kecil; 2) aman, agar usaha kedua pihak tetap lestari dan tidak mengganggu kelangsungan hidup masing-masing pihak; 3) menguntungkan, bahwa kemitraan yang membawa manfaat dan aman akan membawa keuntungan kedua belah pihak.

Prosedur terkait selama ini perlu disempurnakan. Instansi terkait hendaknya mengarah pada peningkatan Penyempurnaan meliputi peningkatan manajemen usaha, SDM yang teknis produksi, peningkatan efisiensi dan kemampuan teknis, serta kemampuan melihat dan memprediksi pasar serta konsumen.

Pola umum bisa memacu pertumbuhan ekonomi di cara tersebut, namun penguasaan akses yang pincang menjadi masalah, yang harus dipecahkan. Pola yang dikembangkan lebih lanjut adalah pola keterkaitan kontrak yang mengarah pada pemberdayaan pengusaha. Cara efektif dalam mengikutsertakan mereka dalam penerapan klausul soal subkontrak, untuk itu Tujuannya agar pengusaha-pengusaha yang sama untuk tumbuh.

... Klaten dalam Angka
... Klaten, Klaten.
... kecil dalam Perekonomian
... dan PPK, Jakarta.
... Pembangunan Ekonomi
... Indonesia, Jakarta.
... Raja: Perubahan Sosial
... Kota Indonesia. PT

... an: Proses Perubahan
... Alisara, Jakarta.
... Regis Pengembangan
... Industri Garmen Batik,

... Sebuah Tinjauan
... Program Pembinaan
... Malang.
... Buruh dalam
... Redesaan: Studi

- Kasus pada Industri Cor Logam di Ceper Kabupaten Klaten*, Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kedaulatan Rakyat, 1996. *Diktum Kemitraan Usaha, Antara Mitos dan Realitasnya*, Kedaulatan Rakyat, 12 Juli 1996. Yogyakarta.
- Kompas, 1992. *Industri Cor Logam di Ceper Sulit untuk Berkembang*, Kompas, Mei 1992. Jakarta.
- Lampelius, Christian dan Gert Thoma, 1979. *Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat: Pendekatan Kebutuhan Pokok*, LP3S, Jakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1987. *Adaptasi Teknologi di Kabupaten Klaten dengan Acuan Khusus pada Industri Logam dan Tenun*, dalam Nat J. Colleta dan Umar Kayam (ed.), *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mubyarto, Sudarsono, Daryanto., 1979. *Industri Pedesaan di Jawa Tengah dan DIY: Satu Studi Evaluasi*, Kerjasama Proyek BIPIK Departemen Perindustrian dan FE UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan Sosial*, YAE PMB-LIPI, Jakarta.
- Pande Made Kutanegara. 1994. *Perekrutan Pekerja Industri Pedesaan: Studi Kasus Industri Cor Logam di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah*, Tesis S2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 1996. *Polarisasi dan Ketimpangan Sosial Ekonomi dalam Industri Pedesaan: Kasus Industri Cor Logam, Klaten, Jawa Tengah*, dalam Agus Dwiyanto (ed.), *Penduduk dan Pembangunan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Rasyid Baswedan, A., 1979. *Laporan Survey Sosial Ekonomi tentang Industri Pedesaan di Kabupaten Klaten*. LP3ES, Jakarta.
- Tadjuddin Noer Effendi, 1993. *Keterkaitan antara Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa di Pedesaan Jawa: Kasus Jatimom*, dalam Tadjuddin Noer Effendi dan Helmut Weber (ed.), *Industrialisasi di Pedesaan Jawa*, Pusat Penelitian Kependudukan, UGM dan Frederich Ebert-Stiftung Goethe Institute Jakarta, Yogyakarta.
- Taufik Abdullah, et al., 1996. *Konsep Fungsi Ganda Koperasi di Indonesia*, Laporan Penelitian. PMB-LIPI, Jakarta.
- Thee Kian Wie, 1988. *Industrialisasi Indonesia: Analisis dan Catatan Kritis*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Umar Kayam, 1987. *Kebudayaan dan Pembangunan*, dalam Nat J. Colleta dan Umar Kayam (ed.), *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

